

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak Daerah

Sebelum membahas tentang pengertian Pajak Daerah, terlebih dahulu diberikan tentang pengertian pajak secara umum. Pengertian Pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjadja dalam S. Munawir (1985: 1) adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Prof. S. I Djajadiningrat dalam S. Munawir (1985: 3), pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Selanjutnya pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam S. Munawir (1985: 41) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003:1) adalah :

1. Fungsi Budgetair

Dalam fungsi budgetair ini pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Boyolali adalah Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah); Dana Perimbangan (bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus); dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Pada dasarnya Pemerintah memungut pajak kepada warga Negara atau masyarakat dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah ini untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi secara tidak langsung masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk kepentingan sendiri melalui pajak yang disetorkan kepada Pemerintah. Juga dimaksudkan bahwa pungutan pajak pelaksanaannya dapat dipaksakan, ini berarti bahwa bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, misalnya dengan surat paksa penyitaan, dan sebagainya. Tidak ada balas jasa yang langsung, karena Pemerintah memberikan balas jasa yang langsung dan secara umum dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, misalnya pembuatan jembatan, jalan raya, jalan tol, bendungan untuk irigasi sawah-sawah, dan prasarana lainnya.

Mengenai pengertian pajak daerah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang dimaksud Daerah Otonom menurut Undang-Undang No. 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom dibagi menjadi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. Untuk membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah diartikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Pajak Daerah (Pasal 2) sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang tersebut di atas, akan tetapi dapat tidak memungut pajak apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kotamadya) guna membiayai keperluan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian berarti bahwa Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan terhadap pajak, mengelola serta menggunakannya untuk pembiayaan urusan rumah tangganya.

B. Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2007 tentang Reklame, Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

1. Perencanaan dan Penataan Reklame

Setiap perencanaan penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Penataan reklame diatur menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kawasan (lokasi).

Penempatan reklame dapat dilaksanakan pada:

- a. Sarana dan prasarana Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1) Trotoar/ bahu jalan;
 - 2) Median jalan;
 - 3) Halte bus;
 - 4) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - 5) Pos jaga polisi/ Pos pengawasan;
 - 6) Jam kota;

- 7) Telepon umum;
 - 8) Bus surat;
 - 9) Tiang lampu penerangan jalan;
 - 10) Tempat hiburan dan rekreasi;
 - 11) Gelanggan Olah Raga;
 - 12) Terminal;
 - 13) Pasar;
 - 14) Water Closer (WC) Umum;
 - 15) Gapura.
- b. Di luar sarana dan prasarana Pemerintah Daerah meliputi tanah atau bangunan baik milik pemerintah, swasta maupun milik pribadi.

Untuk jenis-jenis reklame berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2007 tentang Reklame adalah sebagai berikut:

- a. Reklame papan (billboard/baliho/neon box/megatron/videotron);
- b. Reklame kain;
- c. Reklame selebaran;
- d. Reklame melekat/stiker/poster;
- e. Reklame kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame slide atau reklame film;
- h. Reklame peragaan;
- i. Reklame berjalan;
- j. Reklame suara.

Ukuran reklame dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4m^2 (empat meter persegi);
- b. Reklame sedang dengan ukuran 4m^2 (empat meter persegi) sampai 12m^2 (dua belas meter persegi);
- c. Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12m^2 (dua belas meter persegi).

Konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
- b. Kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang;
- c. Rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka;
- d. Menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan reklame. Kawasan atau lokasi pengenaan pajak dibagi menjadi empat macam yaitu:

- a. Lokasi A terdiri dari:
 - 1) Melintang jalan Provinsi Solo – Semarang dan sekitar Bandara Adi Sumarmo.
 - 2) Melintang jalan Pandanaran.
 - 3) Median jalan Provinsi.

b. Lokasi B terdiri dari:

- 1) Melintang jalan Boyolali – Magelang.
- 2) Di tepi jalan Provinsi Solo – Semarang.
- 3) Di tepi jalan Pandanaran.
- 4) Di tepi jalan Provinsi dan Kabupaten, sekitar Bandara Adi Sumarmo.
- 5) Di tepi jalan Solo – Yogyakarta.

c. Lokasi C terdiri dari:

- 1) Di tepi jalan Boyolali – Magelang, jalan Provinsi di luar Kecamatan Boyolali.
- 2) Di tepi jalan Kabupaten wilayah Kecamatan Boyolali di luar lokasi A dan B.
- 3) Lokasi sekitar pasar di luar lokasi A dan B radius 500m.

d. Lokasi D terdiri dari:

- 1) Di tepi jalan Kabupaten di luar Kecamatan Boyolali.
- 2) Di luar lokasi A, B dan C.

2. Penyelenggaraan Reklame

Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan atau aktifitas yang berhubungan dengan reklame. Ketentuan dalam penyelenggaraan reklame:

- a. Penyelenggaraan reklame dilakukan penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas atau Instansi yang ditunjuk.

- b. Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- c. Setiap penyelenggaraan reklame jenis tertentu, untuk keamanan dan keselamatan harus memenuhi persyaratan teknis konstruksi yang direkomendasikan oleh Dinas atau Instansi terkait. Dalam hal ini dinas yang dimaksud adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
- d. Naskah reklame wajib disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta memenuhi ketentuan:
 - 1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Tidak bertentangan dengan moralitas agama;
 - 3) Tidak bersifat SARA;
 - 4) Tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan
 - 5) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- e. Penyelenggara reklame berkewajiban:
 - 1) Memelihara sarana reklame agar selalu dalam keadaan baik;
 - 2) Membongkar sarana reklame setelah ijin berakhir;
 - 3) Membayar uang jaminan pembongkaran. Uang jaminan pembongkaran adalah sejumlah uang yang dititipkan atau disetor

kepada Kas Daerah untuk membiayai pembongkaran konstruksi apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sendiri. Uang jaminan akan dikembalikan apabila penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri;

- 4) Menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame, termasuk kondisi di luar kuasanya (*force majeure*). Misalnya robohnya papan reklame disebabkan bencana alam yang menimpa harta atau jiwa seseorang sehingga timbul kerugian materiil maupun immateriil bagi korban, maka penyelenggara reklame wajib memberikan ganti kerugian yang layak. Pengganti kerugian oleh pihak penyelenggara reklame tersebut dapat dilimpahkan kepada perusahaan asuransi jika penyelenggaraan reklame tersebut diasuransikan.

f. Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame pada:

- 1) Persil-persil milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kantor-kantor Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- 2) Pohon-pohon penghijauan jalan atau pelindung jalan;
- 3) Rambu-rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon;
- 4) Di lingkungan pendidikan atau sarana pendidikan, museum dan tempat ibadah;
- 5) Badan sungai dan saluran;
- 6) Pagar bumi;
- 7) Jembatan sungai.

3. Objek Pajak dan Subjek Pajak Reklame

a. Objek Pajak

Objek pajak reklame di sini adalah semua penyelenggaraan reklame. Reklame sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 12 Tahun 2007 tentang Reklame yaitu:

1) Reklame Papan

Reklame papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, triplek, alumunium, bambu, besi, plastik, fibre glass, mika, plastik kaca, batu, logam, alat penyinar, atau bahan lain sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.

2) Reklame Kain

Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, dan/atau bahan lain yang sejenis tentang itu.

3) Reklame Selebaran

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

4) Reklame Melekat/Stiker/Poster

Reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.

5) Reklame Kendaraan

Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang perusahaan atau perwakilannya berdomisili di Wilayah Daerah.

6) Reklame Udara

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau lainnya yang sejenis.

7) Reklame Slide atau Reklame Film

Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan atau diperagakan pada layar atau benda lain.

8) Reklame Peragaan

Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

9) Reklame Berjalan

Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara dibawa atau berjalan oleh orang.

10) Reklame Suara

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat atau pesawat apapun.

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

- 1) Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) Penyelenggaran reklame melalui televisi, radio, warta harian;
- 3) Penyelenggaran reklame oleh organisasi politik sosial kemasyarakatan yang semata-mata untuk kepentingan politik sosial kemasyarakatan yang bersangkutan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- 4) Penyelenggaraan reklame untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi yang berdomisili di Kabupaten Boyolali.

b. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak

ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan pemilik reklame atau biro reklame yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa yang dimaksud dihitung berdasarkan jenis dan ukuran reklame, lama pemasangan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan serta lokasi dari reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai sewa reklame.

5. Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

- a. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yakni nilai sewa reklame.

Rumus perhitungan Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai sewa reklame} = \{ (m^2 \times (\text{biaya pemasangan} + \text{biaya pemeliharaan} + \text{nilai strategis}) \}$$

$$\text{Pajak terutang} = \text{tarif pajak} \times \text{nilai sewa reklame}$$

b. Perhitungan Pajak Reklame

Pemasangan reklame jenis billboard konstruksi satu l kaki dengan judul Suara Merdeka, dengan masa pajak satu tahun. Termasuk dalam lokasi A tanah yang digunakan adalah milik negara, dengan ukuran panjang 5 m dan lebar 3,5 m dengan dua sisi. Besarnya pajak terutang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Luas keseluruhan} &= 5 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} \times 2 \text{ sisi} \\ &= 35 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai sewa reklame} &= \{(35 \text{ m}^2 \times (\text{Rp } 65.000 + \text{Rp } 6.500)) + \\ &\quad \text{Rp } 25.000.000\} \\ &= \text{Rp } 27.502.500\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak reklame} &= 25\% \times \text{Rp } 27.502.500 \\ &= \text{Rp } 6.875.625\end{aligned}$$

6. Sistem Pemungutan Pajak Reklame

a. Pendaftaran

- 1) Semua orang atau badan (Wajib Pajak) yang ingin menyelenggarakan reklame mengajukan permohonan ijin menyelenggarakan reklame ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- 2) Formulir harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

b. Pengenaan dan Penetapan Pajak

- 1) Apabila permohonan izin penyelenggaraan reklame disetujui, maka akan ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang berisikan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
- 2) Setelah SKPD diterbitkan, Wajib Pajak harus membayar pajak terutang dalam kurun waktu 30 hari sejak diterbitkannya SKPD.

c. Pembayaran

- 1) Pembayaran dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan membayar langsung ke Kas Daerah atau Pemegang Kas Penerima.
- 2) Pembayaran dilakukan dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas.

d. Penagihan

- 1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.
- 3) Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran, maka Pejabat akan menerbitkan Surat Paksa.

- 4) Setelah 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pajak yang harus dilunasi tidak dibayarkan maka akan dilakukan penyitaan atau pembongkaran terhadap reklame.

e. Ketetapan Pidana

- 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

7. Penentuan dan Perhitungan Target Pajak Reklame

Penentuan target Pajak Reklame di Kabupaten Boyolali ditentukan dengan menambahkan 10% dari target Pajak Reklame tahun sebelumnya (secara keseluruhan). Contoh perhitungan penentuan target Pajak Reklame untuk tahun 2011, jika diketahui target Pajak Reklame tahun 2010 sebesar Rp 327.000.000 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Target tahun 2011} &= (10\% \times \text{Rp } 327.000.000) + \text{Rp } 327.000.000 \\ &= \text{Rp } 359.700.000\end{aligned}$$

Target tahun 2011 yang sebesar Rp 359.700.000 dapat berubah.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Adanya kemungkinan penambahan objek pajak reklame yang baru atau objek pajak yang sudah habis masa pajaknya.
- b. Realisasi tahun sebelumnya dan tingkat efektifitas dari Pajak Reklame itu sendiri.

Untuk perhitungan realisasi Pajak Reklame adalah dengan menjumlahkan seluruh penerimaan Pajak Reklame selama satu tahun.

C. Efektifitas dan Pertumbuhan Pajak Reklame

1. Efektifitas

Pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2009:134).

Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah

ditentukan (Devas, 1989:144). Hasil guna menyangkut terhadap administrasi penerimaan pajak yaitu:

a. Menentukan Wajib Pajak

Menentukan wajib pajak harus ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi wajib pajak untuk menyembunyikan hutang pajaknya.

Hal-hal yang membantu menentukan wajib pajak yaitu:

- 1) Bila pembayaran secara otomatis.
- 2) Bila ada orang harus menunjukkan identitas.
- 3) Bila identitas dikaitkan dengan sumber-sumber informasi yang lain.
- 4) Bila objek pajak sudah jelas sekali.

b. Menetapkan Nilai Kena Pajak

Menetapkan nilai pajak terhutang dilakukan dengan cermat, melibatkan wajib pajak atau petugas pajak dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan dalam menentukan tarif pajak yang benar.

c. Memungut Pajak

Memungut pajak yaitu melakukan pemungutan pajak terhutang pada waktunya lebih mudah bila pembayaran bersifat otomatis, seperti jika orang ingin mendapat kontrak atau surat izin lainnya, orang tersebut harus menunjukkan surat yang sudah melunasi pajak terhutang, dan bila ancaman hukum atas kelalaian membayar cukup berat dapat berlaku sebagai alat untuk menakut-nakuti.

d. Menegakkan Sistem Pajak

Pemeriksaan kelalaian pajak untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem catatan yang baik, dalam arti dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah yang lain. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakkan pajak dan sungguh-sungguh dijalankan. Dalam hal-hal tertentu, menyita objek pajak mungkin perlu dilakukan untuk menunjukkan pemerintah tidak main-main soal pajak.

e. Membukukan Penerimaan

Prosedur penerimaan yang baik, dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua pajak yang dipungut petugas pajak benar-benar dibukukan dan masuk rekening pemerintah. Untuk itu perlu ada langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas, dan sistem pengawasan keuangan. Pemeriksaan mendadak oleh pejabat pajak pada setiap tahap proses menentukan pajak dapat membantu mengurangi keinginan berbuat curang. Laporan teratur mengenai hasil pungutan dibandingkan dalam potensi atau sasaran pajak dapat mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi atau kelemahan-kelemahan sistem pajak bersangkutan. Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna: menghindari pajak (oleh wajib pajak), kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak untuk mengurangi

jumlah pajak terhutang, dan penipuan oleh petugas pajak yang mengantongi sebagian dari penerimaan pajak.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:20), efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat 1, yang dimaksud efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat 1, maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Hasil}}{\text{Keluaran}}$$

Keterangan:

Hasil : Realisasi Penerimaan Pajak

Keluaran : Target Penerimaan Pajak

Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika hasil berbanding keluaran lebih dari atau sama dengan 1 (satu) maka efektif.
- b. Jika hasil berbanding keluaran kurang dari 1 (satu) maka tidak efektif.

2. Pertumbuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pertumbuhan adalah hal keadaan tumbuh, perkembangan (kemajuan dan sebagainya). Menurut Abdul Halim (2001:155), adapun cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Reklame adalah:

$$G_x = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x = Pertumbuhan Pajak Reklame (*Growth*)

X_t = Pajak Reklame tahun tertentu

X_{t-1} = Pajak Reklame tahun sebelumnya